

EKSPOS

Sudut Pandang Jurnalis : WTP BPK Dan Dana Insentif Daerah. Ibarat Perjudian, Suap 2 Miliar Dapat Bonus Puluhan Miliar

Anwar Resa - BOGOR.EKSPOS.CO.ID

Jun 3, 2022 - 07:35



Ilustrasi Suap

Bogor - Sangat disayangkan Pemerintah melanjutkan kebijakan pemberian Dana

Insentif Daerah atau DID di tahun 2022 demi mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD.

Peningkatan layanan dasar publik bidang kesehatan, bidang pendidikan, penyediaan infrastuktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah.

Paparan ini berisi mengenai kebijakan DID di tahun 2022, baik DID atas kinerja tahun sebelumnya maupun DID atas kinerja tahun berjalan sebagaimana diatur dalam PMK No. 160/PMK.07/2021. Dalam PMK Nomor 106, ada beberapa kebijakan baru terkait penyaluran DID tahun 2022.

Kriteria daerah yang mendapatkan dana insentif dikelompokkan menjadi tiga klaster. Daerah yang masuk klaster A mendapat 50 persen dari Rp 4 triliun, sementara klaster B mendapat 35 persen, dan klaster C mendapat 15 persen.

Setidaknya, daerah yang masuk klaster A harus memenuhi kriteria utama, yakni opini BPK WTP untuk 5 tahun terakhir berturut-turut, APBD tepat waktu.

Sementara itu, daerah yang masuk klaster B memenuhi kriteria opini BPK WTP untuk tahun terakhir, APBD tepat waktu.

"Klaster C tidak menggunakan kriteria utama, dapatnya sekitar 15 persen dari Rp 4 triliun.

Kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan pemberian alokasi Dana Insentif Daerah (DID) melalui kompetisi yang lebih sehat dan terbuka. Ini yang perlu dievaluasi, kompetisi sehat dan terbuka seperti apa ?



Kalau acuan nya mendapat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kalau orientasinya adalah Dana Insentif Daerah (DID) maka untuk mendapatkan WTP dari BPK. Tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian suap.

Kita bisa lihat banyak daerah yang mengejar WTP. Hal tersebut terjadi pada Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin. Untuk mendapatkan WTP, Iya suap oknum BPK

Mengingat banyak daerah yang mendapatkan WTP Berturut-turut, tapi muncul masalah korupsi jadi apa artinya WTP Selama ini ? Bahkan diduga, WTP Menjadi Objek kepentingan Oknum- oknum terkait di jajaran pemerintah daerah dan Oknum BPK

Pemerintah Pusat harus mengkaji, mengevaluasi Terkait Dana Insentif Daerah (DID) yang berpotensi dijadikan Objek, ibarat perjudian. Suap 2 Miliar dapat Bonus Puluh Miliar.

Oleh : Anwar Resa

Jurnalis Nasional Indonesia